



**LAPORAN KEGIATAN KOMISI VI DPR RI  
DALAM MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023-2024  
Tanggal 31 Oktober – 15 Januari 2024  
(Masa Sidang Mulai Tanggal 31 Oktober – 5 Desember 2023  
Dan Masa Reses Mulai Tanggal 6 Desember – 15 Januari 2024)  
Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI  
Tanggal 27 September 2023**

---

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 adalah sebagai berikut:

**I. FUNGSI LEGISLASI**

Terkait dengan Fungsi Legislasi, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

1. Rapat secara Konsinyering Panja Penyusunan NA dan RUU tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI pada tanggal 9-10 November 2023, dalam rangka menerima masukan dan pemasalahan Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Sebagai Bahan Masukan Terhadap Penyusunan Naskah Akademik dan RUU Usul DPR Tentang Perlindungan Konsumen. Dengan kesimpulan sebagai berikut:
  - 1) Usulan dan masukan BPKN
    - a. Mengusulkan agar BPKN dapat menjadi Lembaga Non struktural dan independent
    - b. Jumlah Anggota Komisioner yang saat ini berjumlah minimal minimal 15

orang dan maksimal 25 orang, BPKN mengusulkan agar jumlahnya dirubah menjadi 7 atau 9 orang.

- c. Penguatan anggaran BPKN dan harus mandiri
- d. Penguatan tugas dan wewenang BPKN (tidak hanya bersifat rekomendasi/advisory)
- e. Pengaturan mengenai hubungan antar Lembaga/Kementerian agar lebih koordinatif
- f. Penguatan status dari Sekretariat BPKN
- g. Masa jabatan Anggota BPKN selama 5 tahun dan bisa diperpanjang satu kali periode (seperti masa jabatan Presiden)

## 2) Usulan dan Masukan BPSK

- a. Agar Keputusan yang diambil BPSK bersifat final dan binding untuk konteks Arbitase dan Mediasi
- b. Terkait dengan pengajuan kasus yang disampaikan konsumen kepada BPSK dan dalam hal ini kemudian BPSK mengundang para pihak, maka sebaiknya sidang tersebut harus dilaksanakan di BPSK (agar tugas pokok BPSK diperjelas di Undang-undang)
- c. Mengusulkan agar jangka waktu sidang di BPSK yang saat ini hanya 21 hari, dapat diperpanjang lebih lama.
- d. Usulan penganggaran BPSK agar tidak dilakukan melalui mekanisme hibah, namun mempunyai mata anggaran tersendiri seperti Kementerian/Lembaga.
- e. Ketua BPSK seharusnya memiliki tingkat/level yang lebih tinggi kedudukannya daripada yang sekarang, sehingga penganggaran dan cakupan wewenangnya menjadi lebih tinggi.
- f. Diperlukan adanya sinkronisasi dengan undang-undang terkait lainnya, antara lain Undang-Undang Tentang PEMDA

## 3) Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Konsumen menerima masukan dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI. Seluruh masukan akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Naskah

Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Konsumen oleh Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI.

- 4) Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Tentang Pelindungan Konsumen Komisi VI DPR RI meminta Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI untuk menyampaikan rancangan skema tatakelola kelembagaan pelindungan konsumen di Indonesia.
- 5) Beberapa masukan dari Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan RI sebagai berikut :
  - a. BPKN yang memiliki tugas dan fungsi utama sebagai *advisory body* dapat lebih diberdayakan.
  - b. BPSK melakukan tugas utama yang lebih strategis di mana putusan BPSK bersifat final dan mengikat sepanjang merupakan kesepakatan para pihak serta dihilangkannya pasal pengajuan keberatan.
  - c. Perubahan definisi konsumen menjadi konsumen akhir yaitu orang perseorangan atau badan yang menggunakan barang dan/atau memanfaatkan jasa dengan tujuan tidak diperdagangkan kembali atau tidak menjadi unsur dalam menghasilkan barang dan/atau jasa lain. Dengan perubahan tersebut, badan bisa menjadi konsumen selama badan tersebut merupakan konsumen akhir.
  - d. Pembedaan secara jelas pelaku usaha barang dan penyedia jasa dalam Undang-Undang Tentang Pelindungan Konsumen.
  - e. Untuk mengakomodasi perkembangan masyarakat dan teknologi maka perubahan konsep pelaku usaha juga diperlukan mencakup pelaku usaha online
  - f. Perlunya harmonisasi dengan peraturan lain yang lebih baru dan yang lebih khusus, sebagai contoh Undang-Undang Tentang OJK maupun Undang-Undang Tentang Pemerintah Daerah.
  - g. Memberikan perhatian khusus bagi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, di mana pengawasannya dilakukan oleh BPKN.

## **II. FUNGSI ANGGARAN**

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VI DPR RI tidak melaksanakan kegiatan yang terkait dengan Fungsi Anggaran.

## **III. FUNGSI PENGAWASAN**

Terkait dengan Fungsi Pengawasan, pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 Komisi VI DPR RI telah melaksanakan :

### **A. RAPAT KERJA/RDP/RDPU/PANJA KOMISI VI DPR RI**

1. Rapat Pimpinan Komisi VI DPR RI pada tanggal 1 November 2023, dengan acara membahas program kerja Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 dan lain-lain.
  
2. Rapat Internal Komisi VI DPR RI pada tanggal 1 November 2023 dengan acara membahas program kerja Masa Sidang II Tahun Sidang 2023-2024 dan lain-lain.
  
3. Rapat Fit and Proper Test terhadap 9 Calon Anggota KPPU Masa Jabatan 2023-2028 pada tanggal 14 November 2023 dalam rangka penyampaian paparan makalah/visi misi Calon Anggota KPPU. Adapun Calon Anggota KPPU sebagai berikut:
  - 1) Dr. M. Fanshurullah Asa, S.T.,M.T.
  - 2) Dr. Eugenia Mardanugraha, S.Si.,M.E.
  - 3) Lely Pelitasari Soebekty, S.P.,M.E.
  - 4) Taufik Ariyanto
  - 5) Budi Joyo Santoso, S.E.,M.M.
  - 6) Mohammad Reza, S.H.,M.H.
  - 7) Deswin Nur, S.E.,M.E.
  - 8) Dr. Denies Priantinah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA.
  - 9) Goprera Panggabean, S.E.,Ak.

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Komisi VI DPR-RI telah menerima pemaparan dan penjelasan langsung tentang Visi dan Misi dari masing-masing Calon Anggota KPPU Masa Jabatan

2023-2028 terkait dengan Program Kerja Keanggotaan Anggota KPPU Masa Jabatan 2023-2028. Selanjutnya Komisi VI DPR-RI akan segera melakukan Rapat Intern untuk memutuskan Jumlah Calon Anggota KPPU Masa Jabatan 2023-2028 terpilih, dari calon Anggota KPPU yang telah ikut serta dalam *Fit and Proper Test* sesuai dengan standar penilaian dan memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Rapat Fit and Proper Test terhadap 9 Calon Anggota KPPU Masa Jabatan 2023-2028 pada tanggal 15 November 2023 dalam rangka penyampaian paparan makalah/visi misi Calon Anggota KPPU. Adapun Calon Anggota KPPU sebagai berikut:

- 1) Arnold Sihombing, S.H.,M.H.
- 2) Aru Armando, S.H.,M.H.
- 3) Hilman Pujana, S.E.,M.H.
- 4) Moh Noor Rofieq, S.T.
- 5) Yudi Hidayat, S.E.,M.Si
- 6) Andi Zubaidah Assaf, S.T.P.,M.Si
- 7) Toton Hartanto, S.E.,M.Si.,M.Ak.,Ak.,CA.
- 8) Rhido Jusmadi, S.H.,M.H.
- 9) Dr. apt. Gunawan Widjaja S.H.,S.Farm, M.H.,M.M., M.KM. MARS

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Komisi VI DPR-RI telah menerima pemaparan dan penjelasan langsung tentang Visi dan Misi dari masing-masing Calon Anggota KPPU Masa Jabatan 2023-2028 terkait dengan Program Kerja Keanggotaan Anggota KPPU Masa Jabatan 2023-2028. Selanjutnya Komisi VI DPR-RI akan segera melakukan Rapat Intern untuk memutuskan Jumlah Calon Anggota KPPU Masa Jabatan 2023-2028 terpilih, dari calon Anggota KPPU yang telah ikut serta dalam *Fit and Proper Test* sesuai dengan standar penilaian dan memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

5. Rapat Intern Komisi VI DPR RI dalam rangka Pengambilan keputusan Fit and Proper Test atas 18 Calon Anggota KPPU Periode 2023-2028 pada tanggal 16 November 2023.
  
6. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UKM RI pada tanggal 23 November 2023, pembahasan mengenai penanganan kredit macet pelaku UMKM korban Gempa 2006 dan kredit macet pelaku UMKM korban Pandemi Covid-19 dan lain-lain., dengan kesimpulan antara lain :
  - 1) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan HIMBARA untuk menunda lelang agunan/jaminan atas kredit pelaku UMKM yang macet sampai dengan proses Rancangan Peraturan Pemerintah terkait hapus buku dan hapus tagih kredit pelaku UMKM yang macet diselesaikan.
  - 2) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk mengusulkan kepada Perbankan terkait hapus tagih kredit macet UMKM korban gempa bumi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006.
  - 3) Komisi VI DPR RI akan berkoordinasi dengan Pimpinan DPR RI terkait proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sesuai Surat Presiden Republik Indonesia No. R-46/Pres/09/2023 tanggal 19 September 2023.
  - 4) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Koperasi dan UKM RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
  
7. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 23 November 2023, dalam rangka melanjutkan pengambilan keputusan Fit and Proper Test atas Calon Anggota KPPU periode 2023-2028.

8. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan RI pada tanggal 27 November 2023, pembahasan mengenai kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan penting, rafaksi minyak goreng, stabilitas harga komoditas pangan, penurunan kinerja ekspor dan lain-lain. Dengan kesimpulan antara lain :

- 1) Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dari Kementerian Perdagangan RI terkait harga bahan pokok dan kebutuhan penting, rafaksi minyak goreng, stabilitas harga komoditas pangan dan penurunan kinerja ekspor Indonesia.
- 2) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI untuk melakukan pengawasan terhadap kenaikan harga barang kebutuhan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), termasuk harga gula pasir dan hortikultura (beras, cabai dan bawang merah) yang mulai merangkak naik.
- 3) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan RI agar dapat meningkatkan daya saing, identifikasi potensi dan melakukan pemetaan terhadap produk-produk ekspor potensial Indonesia.
- 4) Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian Perdagangan RI agar dapat memberikan informasi mengenai peluang pasar sehingga betul-betul dapat diakses oleh para eksportir Indonesia.
- 5) Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Perdagangan RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

9. Rapat Fit and Proper Test terhadap 25 Calon Anggota BPKN Periode 2023-2026 pada tanggal 29 November 2023 dalam rangka penyampaian paparan makalah/visi misi Calon Anggota BPKN. Adapun Calon Anggota BPKN sebagai berikut:

- 1) Bambang Sugeng Ariadi Subagyono
- 2) Heru Sutadi

- 3) Lasminingsih
- 4) Mukhtar Tompo
- 5) Novriansyah
- 6) Ganef Judawati
- 7) Haris Munandar Nurhasan
- 8) Leonard Victor Hasudungan Tampubolon
- 9) Syaiful Ahmar
- 10) Syamsul Bahri Siregar
- 11) Ferry Firmawan
- 12) Fitrah Bukhari

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Komisi VI DPR-RI telah menerima pemaparan dan penjelasan langsung tentang Visi dan Misi dari masing-masing Calon Anggota BPKN 2023-2026 terkait dengan Program Kerja Keanggotaan Anggota BPKN Periode 2023-2026. Selanjutnya Komisi VI DPR-RI akan segera melakukan Rapat Intern untuk memutuskan Jumlah Calon Anggota BPKN Periode 2023-2026 terpilih, dari calon Anggota BPKN yang telah ikut serta dalam *Fit and Proper Test* sesuai dengan standar penilaian dan memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

10. Rapat Fit and Proper Test terhadap 25 Calon Anggota BPKN Periode 2023-2026 pada tanggal 30 November 2023 dalam rangka penyampaian paparan makalah/visi misi Calon Anggota BPKN. Adapun Calon Anggota BPKN sebagai berikut:

- 1) Jailani
- 2) Muhammad Mufti Mubarak
- 3) Radix Siswo Purwono
- 4) Agus Satory
- 5) Intan Nur Rahmawanti
- 6) Lusiana Dwiyantri
- 7) Sudaryatmo
- 8) Akmal Budi Yulianto
- 9) Aluisius Dwi Rachmanto



- 10) Ermanto Fahamsyah
- 11) Malona Sri R Manurung
- 12) Joko Supono
- 13) N.G.N. Renti Maharaini Kerti

Dengan kesimpulan sebagai berikut:

Komisi VI DPR-RI telah menerima pemaparan dan penjelasan langsung tentang Visi dan Misi dari masing-masing Calon Anggota BPKN 2023-2026 terkait dengan Program Kerja Keanggotaan Anggota BPKN Periode 2023-2026. Selanjutnya Komisi VI DPR-RI akan segera melakukan Rapat Intern untuk memutuskan Jumlah Calon Anggota BPKN Periode 2023-2026 terpilih, dari calon Anggota BPKN yang telah ikut serta dalam *Fit and Proper Test* sesuai dengan standar penilaian dan memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

11. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada tanggal 4 Desember 2023 dengan BUMN Transportasi yakni Dirut PT. KAI, Dirut PT. ASDP Indonesia, Dirut PT. Pelni, Dirut PT. Angkasa Pura I, Dirut PT. Angkasa Pura II, Dirut PT. Jasa Marga, Dirut PT. Pelindo, Dirut PT. Garuda Indonesia, Dirut Perum Damri dalam rangka pembahasan mengenai kesiapan BUMN Transportasi dalam menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Dengan kesimpulan antara lain :
  1. Komisi VI DPR RI mendukung upaya PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Perum DAMRI dalam memastikan kesiapan BUMN transportasi menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
  2. Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Perum DAMRI untuk memastikan ketersediaan dan kesiapan armada

transportasi untuk menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang memadai secara jumlah dan kualitas dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan kenyamanan.

3. Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Perum DAMRI untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral dengan instansi Kementerian/Lembaga untuk memastikan kelancaran Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 terkait kelayakan sarana angkut disemua moda transportasi, rekayasa lalu lintas apabila terjadi kemacetan, antisipasi kondisi cuaca ekstrem dan kebijakan tarif angkutan mudik yang terjangkau bagi masyarakat.
  4. Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Perum DAMRI untuk terus meningkatkan interkoneksi angkutan darat, laut dan udara sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan perjalanan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
  5. Komisi VI DPR RI meminta PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Pelabuhan Indonesia (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Perum DAMRI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
- 
12. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN RI pada tanggal 4 Desember 2023, pembahasan mengenai Evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi capaian kinerja BUMN Tahun 2023 dan rencana aksi pembinaan BUMN Tahun 2024, lain-lain. Dengan kesimpulan antara lain :

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Menteri BUMN RI terkait evaluasi pelaksanaan kinerja Kementerian BUMN tahun 2023 dan evaluasi capaian kinerja BUMN tahun 2023 serta rencana aksi pembinaan BUMN tahun 2024.
  2. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI agar melanjutkan agenda restrukturisasi keuangan dan penyehatan BUMN, khususnya pada sektor infrastruktur dan Kesehatan.
  3. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI untuk melanjutkan penyelesaian proyek Infrastruktur, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain penugasan Jalan Tol Trans Sumatera, KEK dan Pelabuhan.
  4. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk melakukan penajaman fokus bisnis BUMN guna meningkatkan kontribusi dan penciptaan nilai, diantaranya pada BUMN Pangan dan IBC (*Indonesia Battery Corporation*).
  5. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI untuk menyelesaikan agenda holdingisasi BUMN untuk memperkuat kapasitas keuangan dan *competitive advantage* BUMN diantaranya pada BUMN Aviasi, konsolidasi bisnis Data Center Telkom dan Danareksa.
  6. Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN RI untuk melakukan hilirisasi produk BUMN untuk penambahan nilai dari bahan mentah, diantaranya melalui penyelesaian pembangunan kilang dan smelter.
  7. Komisi VI DPR RI meminta Kementerian BUMN RI untuk memberikan jawaban secara tertulis dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.
- 
13. Rapat Intern Komisi VI DPR RI pada tanggal 4 Desember 2023, dalam rangka pembahasan mengenai pengambilan keputusan Fit and Proper Test atas calon Anggota BPKN periode 2023-2026.

**B. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK/KUNJUNGAN KERJA RESES/KUNJUNGAN KERJA PENGAWASAN LUAR NEGERI KOMISI VI DPR RI**

Pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024, Komisi VI DPR RI telah melaksanakan kunjungan kerja antara lain :

1. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan ketersediaan air di cakupan wilayah kerja Perum Jasa Tirta, Jatiluhur dan Kinerja Korporasi ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 s.d 8 November 2023..
2. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan Ketersediaan Stok Pangan di Karawang (ID Foods, Bulog, Sang Hyang Sri) ke Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 s.d 8 November 2023.
3. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan kinerja Korporasi PTPN VIII dan Perum Perhutani di Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada tanggal 6 s.d 8 November 2023
4. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka pemantauan distribusi dan logistik BBM ke PT Pertamina Patra Niaga di Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 s.d 22 November 2023.
5. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI rangka peninjauan jalan tol Bayung Lencir Tempino PT Utama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero) di Provinsi Jambi pada tanggal 20 s.d 22 November 2023.
6. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Dalam rangka peninjauan Dermaga Pemuatan Batubara PT Bukit Asam Tbk. di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 20 s.d 22 November 2023.
7. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan Kinerja Keuangan dan Operasional PT. Bio Farma, Bandung Prov. Jawa Barat pada tanggal 1 s.d 3 Desember 2023.

8. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI dalam rangka peninjauan Operasional Kereta Cepat di Stasiun Tegal Alur, Bandung Prov. Jawa Barat pada tanggal 1 s.d 3 Desember 2023.
9. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka pengawasan BUMN Ketahanan Pangan, Energi dan Pertahanan Nasional serta Distribusi Logistik dan Distribusi Pangan kepada keluarga Penerima manfaat/Bansos Ke Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 6 s.d 10 Desember 2023.
10. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka pengawasan terkait Program Expora untuk pelaku UMKM Ke Solo Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 6 s.d 10 Desember 2023.
11. Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI dalam rangka kesiapan BUMN Energi dan BUMN Transportasi menghadapi hari raya Natal dan Tahun Baru 2024 serta Pengawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) teknologi manufaktur (JIPE) dan Ketahanan Pangan Nasional (stabilitas harga pangan) Ke Surabaya Provinsi Jawa Timur pada tanggal 6 s.d 10 Desember 2023.

#### **IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Kinerja Komisi VI DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023 – 2024.

Jakarta, 15 Desember 2023  
**KABAGSET KOMISI VI DPR RI,**

**Ttd.**

**DEWI RESMINI, S.E., M.Si**  
**NIP. 19710407 199203 2 001**